

# Dinamika Analisis Kebijakan Pendidikan: Perspektif Rasional, Inkremental, Kritis, Postkolonial, dan Evidence-Based Policy

Taufiq Wahyudisyah<sup>1✉</sup>, Khairunnas Rajab<sup>2</sup>  
(1,2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

✉ Corresponding author  
[32590415797@students.uin-suska.ac.id]

## ABSTRACT

Konsep dasar kebijakan pendidikan mencakup landasan teoretis dan normatif yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, ditetapkan, dan diimplementasikan, sekaligus mencerminkan proses sosial, politik, dan intelektual yang bertujuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kajian ini menekankan pentingnya paradigma analisis kebijakan, yang menyediakan kerangka konseptual untuk memahami proses perumusan, interaksi aktor, pengaruh kepentingan, dan dampak kebijakan terhadap praktik pendidikan. Berbagai paradigma, mulai dari pendekatan rasional, inkremental, kritis, hingga postkolonial, menunjukkan kompleksitas realitas pendidikan yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, kepentingan, dan dinamika sosial. Pemahaman terhadap paradigma ini menjadi kunci dalam evaluasi kebijakan secara komprehensif, kritis, dan kontekstual. Penelitian menggu nakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan, membandingkan, dan mengklasifikasikan konsep serta model analisis kebijakan pendidikan, sehingga dapat menggambarkan relevansi dan aplikasinya dalam pengelolaan pendidikan modern. Hasil kajian ini memberikan fondasi teoretis dan praktis bagi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pendidikan, implementasi, Inkremental*

## ABSTRACT

The basic concept of educational policy encompasses both theoretical and normative foundations, explaining how policies are formulated, enacted, and implemented, while reflecting social, political, and intellectual processes aimed at achieving national education goals. This study emphasizes the importance of policy analysis paradigms, which provide a conceptual framework for understanding policy formulation, actor interactions, interest influences, and policy impacts on educational practices. Various paradigms, including rational, incremental, critical, and postcolonial approaches, illustrate the complexity of educational realities shaped by values, ideology, interests, and social dynamics. Understanding these paradigms is key to conducting comprehensive, critical, and contextual policy evaluations. The research employs a qualitative approach through a library research method. Data sources include scholarly literature, books, journal articles, legislation, and official documents relevant to educational policy. Data analysis is conducted through content analysis, interpreting, comparing, and classifying concepts and models of policy analysis to assess their relevance and application in modern education management. The findings provide both theoretical and practical foundations for formulating, implementing, and evaluating educational policies that are more effective, responsive, and oriented toward improving education quality.

**Keyword:** *Educational policy, implementation, Incremental*

Article info

Submitted: March 11, 2026; Accepted: June 25, 2026; Published: June 25, 2026

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan bangsa karena berperan langsung dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, penguatan nilai sosial, serta kemajuan peradaban Tilaar 2012 Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat berjalan secara spontan atau tanpa arah, melainkan memerlukan pengaturan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. William N.2018 Di sinilah kebijakan pendidikan menjadi instrumen fundamental yang menentukan arah, prioritas, serta strategi pengembangan sistem pendidikan. James E. Anderson 2015

Konsep dasar kebijakan pendidikan merujuk pada landasan teoretis dan normatif yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, ditetapkan, dan diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Fitri et al., Trisoni, R. et al. 2024 Kebijakan pendidikan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan hasil proses sosial, politik, dan intelektual yang bertujuan mengatasi persoalan pendidikan sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Widiani., et al. Atikah, C. 2023 Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar kebijakan pendidikan menjadi penting untuk menjelaskan peran negara, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan secara terarah.

Namun, kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai produk keputusan formal. Kebijakan juga merupakan objek kajian ilmiah yang dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis. Di sinilah pentingnya paradigma analisis kebijakan. Paradigma analisis kebijakan menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana aktor-aktor berinteraksi, bagaimana kepentingan memengaruhi keputusan, serta bagaimana kebijakan berdampak pada praktik pendidikan. Dengan kata lain, paradigma analisis kebijakan membantu menjelaskan tidak hanya *apa* kebijakan itu, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* kebijakan tersebut terbentuk dan dijalankan. Dalam perkembangan ilmu kebijakan pendidikan, berbagai paradigma telah digunakan untuk menganalisis kebijakan, mulai dari pendekatan rasional, politik, hingga kritis dan partisipatoris.

Perbedaan paradigma tersebut mencerminkan kompleksitas realitas pendidikan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, ideologi, kepentingan, dan dinamika sosial. Oleh sebab itu, memahami paradigma analisis kebijakan menjadi kunci untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif, kritis, dan kontekstual. Dengan demikian, kajian mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan dan paradigma analisis kebijakan memiliki urgensi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya pemahaman ilmiah tentang hakikat kebijakan pendidikan sebagai fenomena multidimensional. Secara praktis, kajian ini menjadi dasar bagi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan dan paradigma analisis kebijakan menjadi penting sebagai fondasi dalam memahami dinamika pengelolaan pendidikan serta dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoretis mengenai dinamika analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif rasional, inkremental, kritis, dan postkolonial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa karya-karya ilmiah dan buku yang membahas teori dan model analisis kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, seperti pemikiran dari James E. Anderson, William N. Dunn, serta H. A. R. Tilaar. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan kebijakan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan berbagai konsep serta model analisis kebijakan pendidikan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam konteks sistem pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Rasional dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Model rasional adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan menghasilkan manfaat sosial maksimal bagi masyarakat dengan menggunakan prosedur yang efisien dan ilmiah. Model ini berlandaskan pada prinsip rasionalisme dan positivisme, meyakini bahwa masalah dapat diselesaikan melalui analisis data lengkap dan logis. Namun, dalam praktiknya, keputusan publik seringkali tidak sepenuhnya optimal karena keterbatasan rasionalitas manusia dan informasi yang tersedia, sehingga kebijakan yang diambil hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan saja. Marsari et al., 2021 Model rasional merupakan model perumusan kebijakan yang didasari oleh teori positifisme dan rasionalisme yakni perumusan kebijakan dengan cara mengumpulkan data-data yang valid kemudian di analisis, model ini menggunakan rasional dalam perumusan kebijakannya sesuai dengan masalah kebijakan yang dihadapi. Kholifah et al., 2024 Berdasarkan penjelasan diatas model rasional dalam perumusan kebijakan, dengan landasan teori positivisme dan rasionalisme, menekankan penggunaan data valid dan analisis mendalam untuk memecahkan masalah. Meskipun idealnya menghasilkan kebijakan yang optimal, model ini seringkali terbentur pada keterbatasan rasionalitas pembuat kebijakan dan ketersediaan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih mencerminkan kriteria pembuat kebijakan daripada manfaat sosial yang maksimal.

Teori rasional menekankan proses pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, di mana semua alternatif dievaluasi secara komprehensif untuk memilih solusi optimal. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini diterapkan dengan: a. Analisis Mendalam: Pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah, melakukan analisis menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi, mengumpulkan data relevan, dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sebelum membuat keputusan. b. Perencanaan Strategis: Menyusun rencana jangka panjang berdasarkan data dan tren pendidikan untuk mencapai tujuan institusi. Adella Alma Sari.,2025

Anggara 2014 menjelaskan bahwa faham rasional menyatakan kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Model rasional adalah model dimana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan yang rasional adalah dirancang secara tepat untuk memaksimalkan hasil nilai bersih (net value achievement). Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memilih kebijakan yang rasional yaitu : Mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat (preferensi nilai), Mengetahui seluruh alternatif kebijakan yang mendukung pencapaian manfaat kebijakan, Mengetahui seluruh konsekuensi kebijakan, Memperhitungkan rasio antara manfaat dan biaya yang dipikul dari setiap alternatif, Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

### Model Inkremental dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Anggara 2014 mendeskripsikan model inkremental ini dengan memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu, dengan modifikasi-modifikasi kebijakan yang bersifat tambal sulam. Model inkremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politis dari pada yang diinginkan. Anggara (2014) mengatakan ahli ilmu politik Lindblom yang pertama kali mengemukakan model inkremental dalam serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan yang rasional. Pandangan Lindblom menjelaskan bahwa para pembuat keputusan mengembangkan kebijakan melalui suatu proses pembuatan membandingkan keberhasilan secara terbatas dari keputusan yang lalu. Dasar pemikiran inkrementalisme adalah bersifat konservatif, yaitu pembuat kebijakan menerima keabsahan program-program yang telah mapan dan secara diam-diam menyetujui agar kebijakan sebelumnya tetap dilaksanakan. Perhatian terhadap program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi, dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Terdapat beberapa alasan pembuat kebijakan lebih bersifat inkremental, antara lain : Keterbatasan waktu, informasi, ataupun biaya untuk meneliti atas kebijakan yang sedang berjalan atau meneliti dari semua kemungkinan alternatif dari suatu kebijakan yang ada. Menerima keabsahan dari kebijakan sebelumnya karena ketidakpastian akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang baru. Mungkin terdapat investasi dalam program yang ada sehingga dapat mengurangi perubahan

radikal. Secara politis, inkrementalisme adalah cara yang bijaksana. Penting untuk menurunkan ketegangan konflik, memelihara kestabilan, dan melindungi sistem politik (Anggara, 2014)

Ramahdani & Ramadhani 2017 mengatakan model inkremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, dipilih melalui trial and error dari pada melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan menghentikan pencarian alternatif lain ketika mereka mempercayai suatu alternatif yang dapat diterima sudah didapatkan. Namun demikian pembuatan keputusan inkremental merupakan usaha-usaha untuk mencapai keputusan yang lebih rasional

**Tabel 1. Perbedaan Model Inkremental dan Model Rasional**

No	Aspek	Model Rasional	Model Inkremental
1	Pendekatan	Analisis menyeluruh	Perubahan bertahap
2	Tujuan	Solusi optimal	Perbaikan praktis
3	Informasi	Dianggap lengkap	Terbatas
4	Skala perubahan	Besar dan sistemik	Kecil dan gradual
5	Orientasi	Ideal	Realistis
6	Pendekatan	Analisis menyeluruh	Perubahan bertahap

### **Pendekatan Kritis dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

Pendekatan kritis dalam menganalisis kebijakan pendidikan menekankan pentingnya melihat kebijakan tidak hanya dari aspek teknis atau administratif, tetapi juga dari perspektif sosial dan politik yang lebih luas. (Hasan, 2023) Pendekatan ini mengajak kita untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan mencerminkan dan memengaruhi dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis kritis berfokus pada pengungkapan ideologi tersembunyi, ketidakadilan struktural, serta dampak kebijakan terhadap kelompok marginal atau kurang berdaya. (Rizkwanti & Caspari, 2024) (Sari, 2025) (Anggara, 2014) (Apriyanti, 2024) Pendekatan ini juga menuntut keterlibatan multidisipliner dan kolaboratif agar dapat memahami konteks sosial-politik yang kompleks serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, pendekatan kritis penting untuk mengidentifikasi ketimpangan dalam akses dan mutu pendidikan, serta untuk mendorong reformasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi secara lebih menyeluruh. (Rosbianti et al., 2024) Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan kritis tidak hanya menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga mengkritisi struktur dan proses yang melatarbelakangi kebijakan tersebut demi terciptanya pendidikan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

### **Pendekatan Postkolonial dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

Poskolonial atau pasca-kolonial mempunyai hubungan langsung yang erat dengan penjajahan. Menurut Loomba (1998: 1) kolonialisme berasal dari kata colonial berasal dari bahasa Latin 'colonia' yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. Sehingga kata 'kolonialisme' dapat didefinisikan sebagai suatu pemukiman warga di suatu tempat di luar wilayah aslinya namun daerah itu masih dinyatakan sebagai wilayah mereka. Dalam proses kolonial yang dilakukan oleh pendatang dengan tujuan utamanya yaitu mengurus sumber kekayaan, tidak jarang sering menimbulkan peperangan dengan penduduk asli. Dalam sistem kolonialisme, kesejahteraan rakyat daerah koloni tidak diutamakan sehingga sering menimbulkan traumatik dalam sejarah manusia, antara penduduk asli dan pendatang (Sianipar, 2004: 9).

Berakhirnya masa kolonialisme, memunculkan negara atau bangsa antikolonial yang berhasrat untuk melupakan kejadian penjajahan telah terjadi di masa lalu. Poskolonial bukanlah dianggap sebagai sebuah tanda bahwa penjajahan atau kolonialisme telah berakhir, namun pada kenyataannya proses penguasaan lewat sistem baru masih berlanjut. Dalam sistem pemerintahan, sebuah negara bekas jajahan akan terpengaruh dari pemerintahan pada zaman kolonial. Pandangan inilah yang menjadikan negara Barat sebagai acuan kolonialisme modern karena telah terjadi hegemoni budaya masyarakat.

Menurut Loomba (1998: 12) teori postkolonialisme dinyatakan sebagai berikut “*postcolonialisme as the contestation of colonial domination and the legacies of colonialism. The newly independent nation-state makes available the fruits of liberation only selectively and unevenly: the dismantling of colonial rule did not automatically bring about changes for the better in the status of women, the working class or the peasantry in most colonized countries*”.

Dalam hal ini, poskolonialisme diartikan sebagai suatu *perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisannya masih ada hingga saat ini. Kemerdekaan pada suatu negara tidak serta membawa perubahan yang semakin baik dalam urusan perempuan, kelas pekerja maupun petani di negara jajahan.*

Berdasarkan dua definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa terdapat pernyataan dasar mengenai konsep poskolonialisme yakni meyakini bahwa efek-efek kolonial masih dirasakan oleh masyarakat bekas jajahan walaupun mereka sudah merdeka. Penerapan teori poskolonial dalam karya sastra juga diungkapkan oleh Foulcher dan Day (2008: 2) menyatakan bahwa pendekatan poskolonial terhadap kajian sastra membicarakan bagaimana teks-teks sastra mengungkapkan jejak-jejak kolonial, yaitu adanya pertentangan antar bangsa dan antar budaya dalam kondisi hubungan yang tidak setara, hal ini terjadi sejak zaman imperialisme Eropa.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Lo dan Helen (1997) yang mengatakan bahwa teori poskolonial mencakup tiga perhatian, yaitu: suatu kebudayaan masyarakat- masyarakat yang pernah mengalami penjajahan Eropa; respon perlawanan atau wacana tandingan dari masyarakat terjajah maupun dengan masyarakat yang lainnya terhadap penjajahan; semua bentuk marginalitas yang diakibatkan oleh segala bentuk kapitalisme. Tujuan pengembangan dari teori pos-kolonialisme adalah untuk melawan sisa-sisa dampak kolonialisme dalam pengetahuan termasuk pada sisi kultur karena kolonialisme mengarahkan individu untuk saling mendominasi sehingga membuat tatanan dunia makin kacau. Pada kenyataanya, postkolonialisme juga mendapatkan kritik atas sudut pandang mereka yang dinilai tidak konsisten.

Kritikan itu muncul dikarenakan postkolonialisme mengkritik tentang budaya Barat, padahal pada kenyataan perpektif ini sendiri adalah suatu ilmu yang berasal dari Barat. Hal inilah yang kemudian dinilai kurang mampu menggambarkan penderitaan negara terjajah karena mereka tidak merasakannya apa yang dialami secara langsung. Akan tetapi, di luar hal tersebut, postkolonialisme tentu telah memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan dunia. Stigma atas kelas-kelas dalam dunia internasional yang telah diyakini oleh para pos-kolonialisme merupakan konstruksi dari masa kolonialisme. Postkolonialisme telah hadir untuk menentang dampak-dampak yang dihasilkan oleh kolonialisme yang dinilai telah mengkonstruksi tatanan internasional yang penuh diskriminasi

### **Ciri Teori Poskolonialisme**

Ciri khas poskolonialisme adalah fokus pada berbagai pembicaraan yang berkaitan dengan kolonialisme, khususnya orientalisme. Menurut Edward Said, orientalisme adalah merupakan suatu gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai Timur. Pengertian orientalisme menurut Edward Said dapat didefinisikan dengan tiga cara yang berbeda, yaitu : Memandang bahwa orientalisme sebagai suatu paradigma berfikir yang berdasarkan epistemologi dan ontologi yang secara tegas membedakan antara Timur dengan Barat. Orientalisme dapat dipahami sebagai suatu gelar akademis untuk menggambarkan serangkaian lembaga, disiplin dan kegiatan yang umumnya terdapat pada universitas Barat yang peduli pada kajian masyarakat dan kebudayaan Timur. Melihat orientalisme sebagai suatu lembaga resmi yang pada hakekatnya peduli pada Timur

### **Evidence-Based Policy dalam Kebijakan Pendidikan**

Evidence-Based Policy (EBP) dalam kebijakan pendidikan merupakan paradigma pengambilan keputusan yang menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar utama dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam perkembangan tata kelola pendidikan modern, pendekatan ini menjadi semakin penting karena kompleksitas persoalan pendidikan menuntut kebijakan yang tidak hanya normatif atau ideologis, tetapi juga efektif secara empiris. Secara konseptual, evidence-based policy lahir dari perkembangan tradisi ilmiah dalam kebijakan publik yang menekankan rasionalitas, evaluasi program, dan akuntabilitas. Dalam pendidikan, pendekatan ini mengubah cara pemerintah dan lembaga pendidikan membuat keputusan, dari yang sebelumnya berbasis asumsi atau pengalaman praktis menjadi berbasis data dan hasil penelitian sistematis. Dengan demikian, kebijakan pendidikan

tidak hanya dirancang untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga untuk menghasilkan dampak nyata terhadap mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.

### Evidence-Based Policy sebagai Transformasi Paradigma Kebijakan Pendidikan

Penerapan EBP mencerminkan perubahan paradigma dari kebijakan berbasis otoritas menuju kebijakan berbasis bukti. Kebijakan pendidikan modern menuntut adanya justifikasi ilmiah yang dapat diuji dan diverifikasi. Hal ini mendorong penggunaan berbagai metode penelitian seperti eksperimen pendidikan, studi longitudinal, analisis statistik hasil belajar, hingga *systematic review*. Pendekatan ini diperkuat oleh berbagai lembaga internasional seperti OECD dan UNESCO, yang menekankan pentingnya sistem informasi pendidikan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kebijakan berbasis data. Dalam konteks global, negara-negara dengan sistem pendidikan maju umumnya mengembangkan kebijakan melalui analisis empiris terhadap efektivitas program pendidikan.

### Hubungan Evidence-Based Policy dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Salah satu kontribusi utama evidence-based policy adalah meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemilihan program yang terbukti efektif. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan sering melibatkan investasi sumber daya besar, sehingga kesalahan kebijakan dapat menimbulkan dampak luas. Dengan menggunakan bukti empiris, pembuat kebijakan dapat meminimalkan risiko tersebut. Penelitian efektivitas pembelajaran yang dilakukan oleh John Hattie, misalnya, menunjukkan bahwa berbagai strategi pendidikan memiliki tingkat dampak yang berbeda terhadap hasil belajar siswa. Temuan seperti ini memungkinkan pembuat kebijakan menentukan intervensi pendidikan yang paling berdampak tinggi dibandingkan pendekatan yang kurang efektif.

### Peran Data dan Evaluasi dalam Evidence-Based Policy

Salah satu ciri utama evidence-based policy adalah penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data pendidikan dapat berupa: hasil belajar peserta didik, indikator mutu sekolah, tingkat partisipasi Pendidikan, efektivitas program intervensi, evaluasi kinerja guru, dampak kebijakan terhadap pemerataan Pendidikan. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk merancang kebijakan, tetapi juga untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara berkelanjutan. Proses ini membentuk siklus kebijakan berbasis pembelajaran (*policy learning cycle*), di mana kebijakan terus diperbaiki berdasarkan hasil implementasi.

### Analisis Komparatif Antar Model

Analisis komparatif antar model kebijakan pendidikan bertujuan untuk memahami perbedaan pendekatan, keunggulan, keterbatasan, serta konteks penerapan masing-masing model dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Dalam kajian kebijakan publik, terdapat beberapa model utama yang sering digunakan, antara lain model rasional, model inkremental, model politik, dan model berbasis bukti (*evidence-based policy*).

**Tabel 2. Perbandingan Berdasarkan Orientasi Tujuan**

No	Model	Orientasi Utama	Fokus Kebijakan
1	Rasional	Efisiensi dan optimalisasi	Perencanaan sistemik
2	Inkremental	Stabilitas dan keberlanjutan	Penyesuaian bertahap
3	Politik	Kepentingan dan legitimasi	Konsensus sosial
4	Evidence-Based	Efektivitas dan dampak nyata	Data dan evaluasi

### Relevansi Model Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Kontemporer

Kurikulum pendidikan modern menuntut fleksibilitas, relevansi kontekstual, serta orientasi pada kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Model analisis kebijakan berperan dalam: merancang kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, mengevaluasi efektivitas implementasi kurikulum, menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan perkembangan

sosial dan teknologi. Sebagai contoh, reformasi pendidikan di Finlandia menunjukkan bagaimana analisis kebijakan berbasis penelitian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara sistemik.

### Relevansi dalam Mengatasi Ketimpangan dan Tantangan Global

Pendidikan kontemporer menghadapi tantangan ketimpangan akses, kualitas pendidikan, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja global. Model analisis kebijakan membantu pemerintah merancang intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan evidence-based policy yang banyak didukung oleh World Bank menunjukkan pentingnya penggunaan data untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses pendidikan.

### Relevansi dalam Pengambilan Keputusan yang Adaptif dan Berkelanjutan

Lingkungan pendidikan modern bersifat dinamis dan tidak pasti. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Model analisis kebijakan memberikan: kerangka evaluasi berkelanjutan, mekanisme perbaikan kebijakan secara sistemik, dasar pengambilan keputusan yang fleksibel dan responsif.

## SIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan, mengelola, dan mengembangkan sistem pendidikan agar mampu mencapai tujuan nasional serta merespons dinamika perubahan sosial. Untuk memahami dan merumuskan kebijakan pendidikan secara tepat, diperlukan kerangka analisis yang sistematis melalui berbagai model analisis kebijakan. Model rasional menekankan pengambilan keputusan yang logis dan terencana untuk mencapai hasil optimal, sementara model inkremental menyoroti perubahan bertahap yang realistis sesuai kondisi politik dan administratif. Pendekatan postkolonial menghadirkan perspektif kritis terhadap pengaruh sejarah, kekuasaan, dan ketimpangan dalam kebijakan pendidikan, sedangkan evidence-based policy menegaskan pentingnya penggunaan data dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan yang efektif.

Perbandingan antar model menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan pendidikan. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga praktik kebijakan pendidikan kontemporer menuntut pendekatan integratif yang mengombinasikan rasionalitas perencanaan, fleksibilitas implementasi, sensitivitas sosial-budaya, serta dukungan bukti empiris. Dalam konteks pendidikan modern yang ditandai oleh transformasi teknologi, globalisasi, (widiana, 2023) dan meningkatnya tuntutan kualitas, model analisis kebijakan menjadi semakin relevan sebagai alat untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan berbagai model analisis secara komplementer, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara lebih efektif untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adella Alma Sari, A., et al. (2025). Teori pengambilan keputusan: Implikasi teori pengambilan keputusan dalam pendidikan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(2) <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i3.719>
- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. CV Pustaka Setia <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.411>
- Apriyanti, A., Munir, M., & Nurlaila, N. (2024). Konsep, problematika dan kebijakan pendidikan di Eropa: Studi komparatif Finlandia dan Jerman. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.316>
- Fanon, F. (2004). *The wretched of the earth*. Grove Press.
- Hasanuddin, H. (2023). Konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan*.
- Lazarus, N. (1999). *Nationalism and cultural practice in the postcolonial world*. Cambridge University Press.
- Loomba, A. (2005). *Colonialism/postcolonialism* (2nd ed.). Routledge.
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan studi kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik. *The Critical Studies Approach and Its Relevance to Public Policy*.

- Rosbianti, R., Indriyati, I., & Nurlaila, N. (2024). Analisis kritis kebijakan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah*, 1(2), 112–122.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations*. Free Press.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.
- Widiana, W., Fitri, A. S., & Atikah, C. (2023). Konsep dasar kebijakan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.